



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

Jalan R.A Basoeni Nomor 35 Sooko Mojokerto, Jawa Timur Kode Pos 61361  
Telp. (0321) 322814 Fax. (0321) 328788 Website: <http://www.mojokertokab.go.id>

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN MOJOKERTO  
NOMOR 188.45/ 2198 / HK / 416 - 050 / 2022  
TENTANG  
RENCANA KERJA ( RENJA ) SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2023**

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MOJOKERTO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah perlu menetapkan Keputusan Sekretaris DPRD tentang Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Tahun 2023;

Mengingat

1. Undang — undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan **Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme** ) lembar Negara RI Tahun 1999 Nomor **75, Tambahan** Lembaran Negara RI Nomor 3851 ), Undang — undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan **Negara ( Lembaran Negara RI Tahun 2003** Nomor 47 );
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang **Tahapan, Tata Cara** Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi **Pelaksanaan Rencana Pembangunan** Daerah;
4. Peraturan Pemerintah **Nomor 18 Tahun 2016** tentang **Perangkat** Daerah
5. Peraturan Daerah **Kabupaten** Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 **tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten** Mojokerto Tahun 2005 - 2025;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto:
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 — 2021 ( Lembaran Daerah **Kabupaten** Mojokerto Tahun 2016a Nomor 7 );

8. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 69 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

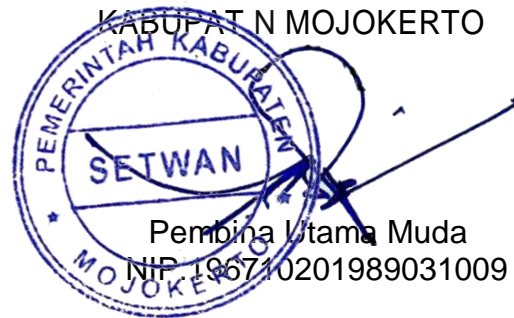
- KESATU : Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Tahun 2023.
- KEDUA : Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adala Renja Sekretariat DPRD;
- KETIGA : Rencana Kerja (RENJA) Sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan sistematika sebagai berikut :
- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
- BAB III TUJUAN SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN
- BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- BAB V PENUTUP
- LAMPIRAN
- KEEMPAT : Uraian Rencana Kerja (RENJA) sebagaimana dimaksud diktum Kedua, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA

Keputusan ini mulai bertaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal, 4 Oktober 2022

SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN MOJOKERTO



**RENCANA KERJA**  
**SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MOJOKERTO**  
**TAHUN 2023**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO**  
**SEKRETARIAT DPRD**  
**TAHUN 2022**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas berkatrahmat dan hidayah-Nya, Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Rencana kerja Tahun 2023 disusun sebagai implementasi dari Tahapan Kegiatan Tahunan dari Rencana Strategis yang disusun selama lima tahunan, dimana Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan Organisasi Perangkat Daerah selama satu tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari RPJMD yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana Kerja ini dapat memberikan arah/pedoman untuk rencana kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto Tahun2023.

Adapun Renja OPD merupakan amanat dari Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan penyusunannya secara rinci di acu dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Namun kami menyadari bahwa hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna, oleh karena itu, kritik dan saran terhadap materi dan substansi pokok Renja tersebut sangat diharapkan, sehingga terjadi peningkatan kualitas rencana yang berkelanjutan. Akhirnya, kepada semua pihak yang membantu penyusunan Renja ini kami ucapkan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati dan melimpahkan rahmat-Nya, kepada kita semua. Amin

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi .....	ii
<b>BABI</b> <b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	5
1.4 Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II</b> <b>HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU</b> .....	<b>8</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	8
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD .....	10
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	16
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	24
<b>BAB III</b> <b>TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b> .....	<b>25</b>
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....	25
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....	25
3.3 Program dan Kegiatan .....	26
<b>BAB IV</b> <b>RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b> .....	<b>38</b>
<b>Bab V</b> <b>PENUTUP</b> .....	<b>42</b>

## BAB I

### 1.1 LatarBelakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamankan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visidan Misi Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan :

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Dalam penyusunannya Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Mengingat arti strategis dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Rencana Kerja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh



pemangku kepentingan dalam forum Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang).

4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indicator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan perkiraan maju.

## **1.2 Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun

- 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
  15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
  16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050 3708 tahun 2020 Tentang Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025

27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024
28. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 15);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2021 Nomor 4)
30. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2021 Nomor 1)
31. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026
32. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto.
33. Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Mojokerto Nomor 188/ /416-050/2021 tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto tahun 2021 – 2026.

### **13 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2023, dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto Tahun 2023.

Sedang tujuan disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Tahun 2023.

## **14 SistematikaPenulisan**

Sistematika penulisan RancanganRenja Sekretariat DPRD Kabupaten MojokertoTahun 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam NegeriRepublik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi mengenai latar belakang penyusunan Renja, dasar hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan yang dipergunakan.

### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Bab ini memuat kejadian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya.

### **BAB III TUJUAN SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN**

Berisi ulasan tentang perumusan tujuan dan sasaran, yang didasarkan atas rumusan, isu-isu penting penyelenggaraan, tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target, kinerja Renstra OPD.

### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Berisi ulasan tentang usulan Rencana Kerja dan pendanaan OPD pada APBD tahun 2023. Disini terdapat program kegiatan yang sudah dianggarkan di Program dan kegiatan kinerja Renstra OPD Tahun 2021-2026.

### **BAB V PENUTUP**

Berisikan urusan penutup berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA**  
**PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Sekretariat DPRD pada Tahun 2021 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan dari APBD Kabupaten Mojokerto. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada tahun 2021 adalah:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pencapaian kinerja program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah terlaksananya Kegiatan pelayanan administrasi perkantoran dalam menunjang kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto secara keseluruhan

Kegiatan :

- a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
  - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 98,25%
  - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 98,75%
- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
  - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 68,34%
- c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sub kegiatan:
  - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 84,30%
- d) Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 98,44
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 96,06
  - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 82,34
  - Penyediaan bahan/ material 79,03
  - Fasilitas Kunjungan Tamu 71,93%

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 91,91%
- e) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 82,06%
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 84,45%
- f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 59,06%
  - Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 73,57%
  - Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 27,79%
- g) Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
  - Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 81,43%
  - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 85,44%
  - Pelaksanaan Medical Check Up DPRD 62,44%
- h) Layanan Administrasi DPRD
  - Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 96,42%

## 2. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

Pencapaian kinerja program Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD adalah terlaksananya Tri Fungsi Dewan (Legislasi, Budgeting dan Pengawasan) serta terfasilitasinya Hak DPRD sesuai peraturan yang berlaku.

Kegiatan :

- a) Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD. Dengan sub kegiatan:
  - Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 96,57%
  - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 98,06%
  - Fasilitasi Penyusunan Penjelasan / Keterangan dan / atau Naskah Akademik 89,86%

- b) Pembahasan Kebijakan Anggaran. Dengan sub kegiatan
  - Pembahasan KUA dan PPAS 85,65%
  - Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 73,88%
  - Pembahasan APBD 92,59%
  - Pembahasan APBD Perubahan 75,42%
  - Pembahasan Laporan Semester 0%
  - Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 87,90%
- c) Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
  - Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum 94,05%
  - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 68,76%
  - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 98,30%
  - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 78,70%
  - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam 94,36%
  - Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 0%
  - Pengawasan Penggunaan Anggaran 93,46%
  - Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 99,99%
- d) Peningkatan Kapasitas DPRD
  - Bimbingan Teknis DPRD 96,75%
  - Publikasi dan Dokumentasi Dewan 86,85%
  - Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 46,47%
  - Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 40,80%
  - Penyusunan Program Kerja DPRD 87,48%
- e) Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
  - Kunjungan Kerja Dalam Daerah 99,20%
  - Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 0%
  - Pelaksanaan Reses 96,42%



- f) Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
  - Pengawasan Kode Etik DPRD 76,26%
- g) Fasilitasi Tugas DPRD
  - Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 90,23%
  - Penyusunan Laporan Kinerja DPRD 98,10%
  - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 97,75%
  - Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 91,69%

Secara umum capaian realisasi anggaran dari 15(limabelas)kegiatan dengan 50 (lima puluh) sub kegiatan di atas rata-rata adalah hampir mencapai 85,09%. Selanjutnyapencapaian Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto sebagaimana terdapat pada Tabel TC-29.

Tabel.1.1. ( T C 29) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022

Kode	Urusan / bidang urusan pemerintah daerah dan Program / kegiatan	Indikator kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target kinerja capaian program (Rensra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (n-2)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
					target Renja Perangkat Daerah 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2022	Tingkat Realisasi 2022		Realisasi capaian program dan kegiatan sampai dengan tahun berjalan (n-1)	Tingkat capaian realisasi target Renstra (n-1)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan Jasa Komunikasi, air Bersih dan Listrik	60	36	12	12	100%	12	60	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Peizinan kendaraan Dinas/ Oprasional	Jumlah kendaraan operasional,perpajakan STNK,Pajak Kendaraan dan KIR	60	38	12	12	100%	12	62	103%
	Penyediaan Alat Tulis kantor	Jumlah Paket Penyediaan Alat tulis kantor	12	9	3	3	100%	2	14	117%



	<b>dan prasarana Aparatur</b>										
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah waktu pemeliharaan Gedung Kantor sampai berfungsi baik	60	36	12	12	100%	12	60	100%	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah waktu pemeliharaan Kendaraan dinas/operasional	60	36	12	12	100%	12	60	100%	
	pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah waktu pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	60	36	12	12	100%	12	60	100%	
	Pengendalian Kendaraan Operasional Roda 2	Jumlah kendaraan operasional roda 2 yg tersedia	-	-	-	-	0%	-	-	0%	
	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>							-			
	Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya (sekretariat)	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya yang tersedia bagi ASN	150	90	30	-	0%	30	120	80%	
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang tersedia bagi ASN	150	90	30	-	0%	30	120	80%	

	<b>Program Peningkatan Tata Kelola Kesekretariatan</b>										
	Workshop Rapat-rapat Koordinasi Sekretariat DPRD	Jumlah workshop ASDEKSI yang diikuti ASN sesuai Tupoksi	35	20	7	7	100%	7	34	97%	
	Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya (DPRD)	Jumlah DPRD yang mendapat Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	150	100	50	-	0%	50	150	100%	
	hearing/konsultasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	Jumlah hearing/konsultasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama sera pengamanan	40	24	8	8	100%	8	40	100%	
	Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan	Jumlah Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan	125	74	25	22	88%	22	118	94%	
	Rapat-rapat paripurna	Jumlah Rapat-rapat paripurna	180	98	36	30	83%	36	164	91%	
	Kegiatan reses	Jumlah aspirasi masyarakat (Jumlah Kegiatan Reses)	15	8	3	3	100%	2	13	87%	



	Penyusunan Rencana Tahunan dan laporan Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan laporan kinerja yang akuntable	20	12	4	4	100%	4	<b>20</b>	100%
	<b>Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah</b>							-		
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas	75	55	15	14	93%	15	<b>84</b>	112%
	Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Kunker Pimpinan dan Anggota DPRD	60	40	14	14	100%	14	<b>68</b>	113%
	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Bimtek Kapasitas DPRD sesuai dengan tugas dan fungsinya	20	12	6	6	100%	4	<b>22</b>	110%
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Pimpinan dan anggota DPRD ke Luar dan Dalam Daerah	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD ke Dalam dan Luar Daerah	60	40	14	14	100%	14	<b>68</b>	113%
	Penyusunan Raperda Bidang Komisi I	Jumlah NA RancanganPerda Bidang Komisi I	5	3	1	-	0%	1	<b>4</b>	80%

	Penyusunan Raperda Bidang Komisi II	Jumlah NA RancanganPerda Bidang Komisi II	5	3		1	-	0%	1	4	80%
	Penyusunan Raperda Bidang Komisi III	Jumlah NA RancanganPerda Bidang Komisi III	5	3		1	-	0%	1	4	80%
	Penyusunan Raperda Bidang Komisi IV	Jumlah NA RancanganPerda Bidang Komisi IV	5	3		1	-	0%	1	4	80%



## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Sesuai Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto adalah memberikan pelayanan administratif kepada anggota DPRD dalam rangka penyelenggaraan kegiatan dan sidang-sidang serta mengelola urusan dalam dan keuangan DPRD juga penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto adalah sebagaimana tabel TC 30

Tabel 1.2.(T-C 30) Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD

No	Indikator	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Proyeksi	Catatan Analisis
			Tahun 2020 (thn n-3)	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun .2022 (thn n+1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2020 (thn n-3)	tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024 (thn n+1)	
		4	5	6	7	8	9	10		11		12	13	
	Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Kesekretariatan DPRD (IKM DPRD)		64	70	71	72	72	65,53	70,16	71.2	-	-	72	
	Persentase Perda yang disyahkan		80%	-	-	-	-	80%	-	-	-	-	-	
	Persentase pemenuhan hak DPRD sesuai peraturan		80%	-	-	-	-	80%	-	-	-	-	-	
	Persentase Pelaksanaan tugas dan fungsi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang dibahas		-	60%	75	80	85		160	<b>108,55%</b>	-	-	85	
	Persentase Pelaksanaan tugas dan fungsi Pembahasan Kebijakan Anggaran yang terfasilitasi		-	90%	90%	90%	90%		100	<b>100%</b>	-	-	90%	
	Persentase Pelaksanaan tugas dan fungsi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang terfasilitasi		-	80%	80%	80%	85%		100	99,48%	-	-	85%	
	Persentase Pemenuhan Hak dan Kewajiban DPRD sesuai Peraturan		-	90%	90%	90%	90%		100	<b>102,48%</b>	-	-	90%	

Sebagaimana Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021 bahwa di Tahun 2022 Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto menetapkan besaran Indikator Kinerja Utama yaitu IKM DPRD sebesar 71.

Setelah dilakukan pengukuran kinerja melalui metode survey dan wawancara kepada anggota DPRD di semester I dan Semester II, maka diperoleh hasil survey nilai indeks kepuasan DPRD di akhir tahun 2021 dengan nilai realisasi kinerja sebesar 71,2 atau mencapai 100,22% atau kategori BAIK.

Perolehan angka indeks tersebut dihitung berdasarkan ketentuan unsur- unsur pelayanan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan pelayanan Publik dengan mempertimbangkan unsur pelayanan berdasarkan tugas pokok dan fungsi digabung maka unsur pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto di Tahun 2021 mempunyai nilai kinerja sebesar 65,53.

Dari capaian kinerja tersebut diketahui bahwa target yang direncanakan oleh Sekretariat DPRD ditahun 2022 yaitu sebesar 71 telah terpenuhi dan bahkan memperoleh capaian kinerja melebihi target sebesar 0,22 atau presentase capaian melebihi target sebesar 0,22%.

Untuk lebih detailnya dengan unsur pelayanan mempertimbangkan TUPOKSI dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Nilai rata-rata FASILITAS UMUM 53 dengan interpretasi Fasilitas Umum perlu ditingkatkan.
- b. Nilai rata-rata FASILITAS RUANG RAPAT 63,00 dengan interpretasi pelayanan sudah baik tapi perlu ditingkatkan kualitasnya.
- c. Nilai rata-rata FASILITAS RUANG KERJA/ FRAKSI sebesar 63 dengan interpretasi perlu ditingkatkan kualitasnya.
- d. Nilai rata-rata FASILITAS MAKANAN DAN MINUMAN sebesar 63 dengan interpretasi perlu ditingkatkan kualitasnya.
- e. Nilai rata-rata FASILITAS ANGGARAN sebesar 56,5 dengan interpretasi perlu ditingkatkan kualitasnya.
- f. Nilai rata-rata FASILITAS SUMBER DAYA MANUSIA ( SDM ) sebesar 54,5 dengan interpretasi perlu ditingkatkan kualitasnya.
- g. Nilai rata-rata FASILITAS PERSONAL sebesar 52,33 dengan interpretasi perlu ditingkatkan kualitasnya.
- h. Nilai rata-rata FASILITAS KEGIATAN sebesar 50,5 dengan interpretasi perlu ditingkatkan kualitasnya.
- i. Nilai rata-rata FASILITAS INFORMASI sebesar 49,33 dengan interpretasi perlu ditingkatkan kualitasnya.

Dari Nilai rata-rata persepsi yang diperoleh dari 4 (Empat) bagian di Sekretariat DPRD dapat diketahui bahwa 4 (empat) bagian tersebut telah melampaui capaian kinerjanya, tetapi diharapkan Bagian-bagian tersebut lebih dapat meningkatkan layanannya kepada segenap anggota DPRD.

Dan apabila ke 9 (sembilan) angka indeks tersebut diatas diakumulasikan ke dalam angka IKM, maka diperoleh angka 71,2.

## **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD**

### **1. Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto maka untuk memberikan pelayanan yang prima kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan tugas dan kewajibannya sebagai Badan Legislatif Daerah yang mencerminkan makna strategis dan mencerminkan aspirasi masyarakat di Kabupaten Mojokerto, maka dalam upaya untuk mendukung tugas organisasi tersebut Sekretariat DPRD merumuskan Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan sebagai landasan atau dasar dalam acuan kinerja selama 5 (lima) tahun mendatang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Penyelenggaraan administrasi DPRD;
- c. Penyelenggaraan Rapat-rapat DPRD;
- d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD.

### **2. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto**

Permasalahan yang dihadapi Sekretariat DPRD Kab. Mojokerto adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan kinerja, karena dampaknya yang signifikan bagi kemajuan Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto dimasa datang dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional.

Berikut identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto**

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (Kewenangan OPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan OPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Serap Aspirasi Masyarakat	Pelaksanaan Reses	Jumlah Reses	Fasilitasi bagi DPRD untuk melakukan reses	Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya jaring asmara secara dinamis dan demokratis	Belum optimalnya penyerapan aspirasi masyarakat
Konsultasi /Koordinasi DPRD	Terlaksananya Kunjungan Kerja DPRD	Jumlah Kunler dan Peninjauan Lapangan	Memfasilitasi kunjungan kerja DPRD	Tingginya standart pelayanan yang dibutuhkan anggota DPRD	Keterbatasan sarana dan prasarana.
Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Bimtek yang diikuti	Memfasilitasi DPRD melaksanakan Studi Banding	Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tupoksi	Belum optimalnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Birokrasi Sekretariat Dewan
Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan DPRD	Publikasi Rapat Paripurna DPRD	Jumlah Rapat Paripurna yang di publikasi	Memfasilitasi Publikasi Rapat DPRD	Kebutuhan Masyarakat dalam pemberian informasi sebagai bentuk transparansi	Tingkat kedisiplinan anggota dalam menghadiri sidang / rapat rendah.

## 2.4 Review terhadap Rancangan RKPD

Perbandingan antara rancangan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto pada TA. 2023 adalah sebagaimana tabel TC 31

Review terhadap rancangan akhir Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan proses membandingkan antara rancangan akhir RKPD dengan hasil analisis kebutuhan (riil) dalam Renja SKPD.

Berkaitan hal tersebut, maka hasil proses membandingkan antara rancangan akhir RKPD Kabupaten Mojokerto dengan Renja SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto telah sesuai.

**Tabel 2.1 (TC.31) Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023**

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
					(Rp.)					(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	MOJOKERTO	Nilai SAKIP	79 (BB)	47.261.067.410	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	MOJOKERTO	Nilai SAKIP	79 (BB)	47.261.067.410	
			Jumlah Inovasi yang terinternalisasi serta berkelanjutan	1 inovasi				Jumlah Inovasi yang terinternalisasi serta berkelanjutan	1 inovasi		
	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>MOJOKE RTO</b>	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai target	90%	20.000.000	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>MOJOKE RTO</b>	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai target	90%	20.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	10.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	10.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	MOJOKE RTO	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	10.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	MOJOKE RTO	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	10.000.000	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90%	3.339.369.000	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90%	3.339.369.000	



	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	MOJOKE RTO	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN per bulan	27 orang/bulan	3.339.369.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	MOJOKE RTO	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN per bulan	27 orang/bulan	3.339.369.000	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		IP ASN Perangkat Daerah	<b>81</b>	600.000.000	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		IP ASN Perangkat Daerah	<b>81</b>	600.000.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	MOJOKE RTO	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30 paket	100.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	MOJOKE RTO	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30 paket	100.000.000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	70 orang	500.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	70 orang	500.000.000	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	MOJOKE RTO	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	<b>100%</b>	1.001.914.290	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	MOJOKE RTO	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	<b>100%</b>	1.001.914.290	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	MOJOKE RTO	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9,00	6.914.290	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	MOJOKE RTO	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9,00	6.914.290	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	MOJOKE RTO	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12,00	35.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	MOJOKE RTO	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12,00	35.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1,00	150.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1,00	150.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	MOJOKE RTO	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1,00	10.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	MOJOKE RTO	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1,00	10.000.000	

	Penyediaan bahan/Material	MOJOKE RTO	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1,00	150.000.000	Penyediaan bahan/Material	MOJOKE RTO	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1,00	150.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12,00	200.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12,00	200.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	MOJOKE RTO	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12,00	450.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	MOJOKE RTO	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12,00	450.000.000	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan</b>	100%	2.500.000.000	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan</b>	100%	2.500.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	MOJOKE RTO	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12,00	600.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	MOJOKE RTO	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12,00	600.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor yang disediakan	48,00	1.900.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor yang disediakan	48,00	1.900.000.000	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	MOJOKE RTO	<b>Persentase barang milik daerah dalam keadaan baik</b>	82%	2.350.000.000	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	MOJOKE RTO	<b>Persentase barang milik daerah dalam keadaan baik</b>	82%	2.350.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24,00	600.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24,00	600.000.000	

	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	MOJOKE RTO	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1.350.000.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	MOJOKE RTO	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1.350.000.000	
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	58 unit	400.000.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	58 unit	400.000.000	
	<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>MOJOKERTO</b>	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD terfasilitasi	100%	36.749.784.120	<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>MOJOKERTO</b>	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD terfasilitasi	100%	36.749.784.120	
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD		Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	50 org/bln	36.264.784.120	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD		Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	50 org/bln	36.264.784.120	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	MOJOKE RTO	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	150,00	400.000.000	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	MOJOKE RTO	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	150,00	400.000.000	
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	MOJOKE RTO	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	50,00	85.000.000	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	MOJOKE RTO	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	50,00	85.000.000	
	<b>Layanan Administrasi DPRD</b>	<b>MOJOKE RTO</b>	Persentase Layanan Administrasi DPRD terfasilitasi	100%	700.000.000	<b>Layanan Administrasi DPRD</b>	<b>MOJOKE RTO</b>	Persentase Layanan Administrasi DPRD terfasilitasi	100%	700.000.000	
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat DPRD	12,00	700.000.000	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat DPRD	12,00	700.000.000	

	<b>Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD</b>	<b>MOJOKE RTO</b>			<b>40.716.900.046</b>	<b>Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD</b>	<b>MOJOKE RTO</b>			<b>40.716.900.046</b>	
			Persentase Pelaksanaan tugas dan fungsi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang terfasilitasi	75%	<b>6.870.000.000</b>			Persentase Pelaksanaan tugas dan fungsi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang terfasilitasi	75%	<b>6.870.000.000</b>	
	<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	<b>MOJOKE RTO</b>	Persentase Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD terfasilitasi	75%	6.870.000.000	<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	<b>MOJOKE RTO</b>	Persentase Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD terfasilitasi	75%	6.870.000.000	
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	<b>MOJOKE RTO</b>	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	2,00	550.000.000	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	<b>MOJOKE RTO</b>	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	2,00	550.000.000	
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	<b>MOJOKE RTO</b>	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	6,00	4.000.000.000	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	<b>MOJOKE RTO</b>	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	6,00	4.000.000.000	
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan / Keterangan dan / atau Naskah Akademik	<b>MOJOKE RTO</b>	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	4,00	2.320.000.000	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan / Keterangan dan / atau Naskah Akademik	<b>MOJOKE RTO</b>	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	4,00	2.320.000.000	
			Persentase Pelaksanaan tugas dan fungsi Pembahasan Kebijakan Anggaran yang terfasilitasi	90%	7.856.900.046			Persentase Pelaksanaan tugas dan fungsi Pembahasan Kebijakan Anggaran yang terfasilitasi	90%	7.856.900.046	

	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>MOJOKE RTO</b>	Persentase dokumen Kebijakan Anggaran dibahas	90%	7.856.900.046	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>MOJOKE RTO</b>	Persentase dokumen Kebijakan Anggaran dibahas	90%	7.856.900.046	
	Pembahasan KUA dan PPAS	<b>MOJOKE RTO</b>	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1,00	1.118.408.000	Pembahasan KUA dan PPAS	<b>MOJOKE RTO</b>	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1,00	1.118.408.000	
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	<b>MOJOKE RTO</b>	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1,00	1.110.024.000	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	<b>MOJOKE RTO</b>	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1,00	1.110.024.000	
	Pembahasan APBD	<b>MOJOKE RTO</b>	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1,00	3.050.000.000	Pembahasan APBD	<b>MOJOKE RTO</b>	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1,00	3.050.000.000	
	Pembahasan APBD Perubahan	<b>MOJOKE RTO</b>	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1,00	1.118.024.000	Pembahasan APBD Perubahan	<b>MOJOKE RTO</b>	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1,00	1.118.024.000	
	Pembahasan Laporan Semester	<b>MOJOKE RTO</b>	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1,00	342.420.046	Pembahasan Laporan Semester	<b>MOJOKE RTO</b>	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1,00	342.420.046	
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	<b>MOJOKE RTO</b>	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1,00	1.118.024.000	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	<b>MOJOKE RTO</b>	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1,00	1.118.024.000	
			Persentase Pelaksanaan tugas dan fungsi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang terfasilitasi	80%	8.650.000.000			Persentase Pelaksanaan tugas dan fungsi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang terfasilitasi	80%	8.650.000.000	
	<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>MOJOKE RTO</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan terfasilitasi</b>	80%	8.650.000.000	<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>MOJOKE RTO</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan terfasilitasi</b>	80%	8.650.000.000	

	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	MOJOKE RTO	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan dan Hukum	4,00	1.600.000.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	MOJOKE RTO	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan dan Hukum	4,00	1.600.000.000	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	MOJOKE RTO	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Urusan Bidang Infrastruktur	2,00	900.000.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	MOJOKE RTO	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Urusan Bidang Infrastruktur	2,00	900.000.000	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	MOJOKE RTO	Jumlah laporan hasil pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	4,00	1.600.000.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	MOJOKE RTO	Jumlah laporan hasil pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	4,00	1.600.000.000	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	MOJOKE RTO	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	4,00	1.600.000.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	MOJOKE RTO	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	4,00	1.600.000.000	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	MOJOKE RTO	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	2,00	900.000.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	MOJOKE RTO	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	2,00	900.000.000	
	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan	MOJOKE RTO	Jumlah dokumen hasil Pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan	1,00	400.000.000	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan	MOJOKE RTO	Jumlah dokumen hasil Pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan	1,00	400.000.000	

	oleh Badan Pemeriksa Keuangan		keuangan oleh BPK			oleh Badan Pemeriksa Keuangan		laporan keuangan oleh BPK			
	Pengawasan Penggunaan Anggaran	MOJOKE RTO	Jumlah dokumen hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1,00	650.000.000	Pengawasan Penggunaan Anggaran	MOJOKE RTO	Jumlah dokumen hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1,00	650.000.000	
	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawab an Kepala Daerah	MOJOKE RTO	Jumlah Rekomendasi hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawab an Kepala Daerah	1,00	1.000.000.000	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawab an Kepala Daerah	MOJOKE RTO	Jumlah Rekomendasi hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawa ban Kepala Daerah	1,00	1.000.000.000	
			Persenta se Pemenu han Hak dan Kewajiba n DPRD sesuai Peratura n	90%	17.340.000.000			Perse ntase Peme nuhan Hak dan Kewaj iban DPRD sesua i Perat uran	90%	17.340.000.000	
	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>MOJOKE RTO</b>	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD terfasilitasi	90%	4.720.000.000	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>MOJOKE RTO</b>	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD terfasilitasi	90%	4.720.000.000	
	Bimbingan TeknisDPRD	MOJOKE RTO	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6,00	3.200.000.000	Bimbingan TeknisDPRD	MOJOKE RTO	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6,00	3.200.000.000	
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	MOJOKE RTO	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	12,00	700.000.000	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	MOJOKE RTO	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi	12,00	700.000.000	

								Dewan			
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	MOJOKE RTO	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	10,00	120.000.000	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	MOJOKE RTO	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	10,00	120.000.000	
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	MOJOKE RTO	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	70,00	150.000.000	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	MOJOKE RTO	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	70,00	150.000.000	
	Penyusunan Program Kerja DPRD	MOJOKE RTO	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1,00	550.000.000	Penyusunan Program Kerja DPRD	MOJOKE RTO	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1,00	550.000.000	
	<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>MOJOKE RTO</b>	Persentase kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat terfasilitasi	100%	2.820.000.000	<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>MOJOKE RTO</b>	Persentase kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat terfasilitasi	100%	2.820.000.000	
	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	MOJOKE RTO	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1,00	120.000.000	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	MOJOKE RTO	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1,00	120.000.000	
	Pelaksanaan Reses	MOJOKE RTO	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3,00	2.700.000.000	Pelaksanaan Reses	MOJOKE RTO	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3,00	2.700.000.000	
	<b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>	<b>MOJOKE RTO</b>	Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD terfasilitasi	90%	300.000.000	<b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>	<b>MOJOKE RTO</b>	Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD terfasilitasi	90%	300.000.000	
	Pengawasan Kode Etik DPRD	MOJOKE RTO	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	3,00	300.000.000	Pengawasan Kode Etik DPRD	MOJOKE RTO	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	3,00	300.000.000	
	<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>	<b>MOJOKE RTO</b>	<b>Persentase Tugas DPRD terfasilitasi</b>	90%	9.500.000.000	<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>	<b>MOJOKE RTO</b>	<b>Persentase Tugas DPRD terfasilitasi</b>	90%	9.500.000.000	



	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	MOJOKE RTO	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	4,00	5.000.000.000	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	MOJOKE RTO	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	4,00	5.000.000.000	
	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	MOJOKE RTO	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1,00	850.000.000	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	MOJOKE RTO	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1,00	850.000.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	MOJOKE RTO	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	3,00	650.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	MOJOKE RTO	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	3,00	650.000.000	
	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	MOJOKE RTO	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	4,00	3.000.000.000	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	MOJOKE RTO	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	4,00	3.000.000.000	

## 2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Merupakan deskripsi hasil kajian terhadap program / kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Provinsi dari penelitian lapangan pengamatan pelaksanaan Musrenbang kabupaten kota yang dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Sehubungan hal tersebut, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto tidak melakukan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dimaksud dikarenakan tidak adanya keterkaitan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Tabel 2.2. (TC 32) Usulan Program dan Kegiatan dari Kepentingan tahun 2023  
Kabupaten Mojokerto

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN VOLUME	CATATAN

## **BAB III TUJUAN DAN SASARAN**

### **3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Sesuai Perpres Nomor 27 tahun 2015 tentang sekretariat Jendral DPRD RI dan badan Keahlian DPR RI. Sekretariat jendral DPR RI adalah unsur penunjang DPR yang berkedudukan sebagai kesekretariatan yang tugasnya memberikan bantuan teknis, Administratif dan bantuan keahlian.

Sesuai Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto adalah memberikan pelayanan administratif kepada anggota DPRD dalam rangka penyelenggaraan kegiatan dan sidang-sidang serta mengelola urusan dalam dan keuangan DPRD juga penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi kepala daerah dengan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi di masa mendatang. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam perubahan RPJMD, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto tetap menetapkan tujuan dengan rumusan sebagai berikut : **“Mewujudkan Pelayanan Publik yang Optimal”**.

Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang

akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka Sekretariat DPRD tidak mengubah sasaran Perangkat Daerah dan tetap menetapkan sasaran yang ingin dicapai pada program prioritas adalah:

**“Meningkatkan Pelayanan Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD”.**

Sedang pada kegiatan rutin sasarnya adalah **" Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah "**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Capaian 2022	Target 2023
1.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik		Indek Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD (IKM DPRD)	71,16	72
		Terwujudnya Tata kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Revormasi Birokrasi Perangkat Daerah	66	67
		Meningkatkan Pelayanan Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Dukungan Pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang terfasilitasi	102,55%	81%

\*\*Cara menghitung capaian IKM dilakukan dengan menilai 9 unsur pelayanan melalui kuesioner pada pimpinan dan anggota DPRD

### 3.3. Program dan Kegiatan

- a. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu.

b. Adapun program-program di tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut

**Program Utama :**

1. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD;

Dari program tahun 2023 tersebut di atas diuraikan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut :

**1. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**

- 1.1 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD
  - 1.1.1 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
  - 1.1.2 Pembahasan Rancangan Perda
  - 1.1.3 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
  - 1.1.4 Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik
- 1.2 Pembahasan Kebijakan Anggaran
  - 1.2.1 Pembahasan KUA dan PPAS
  - 1.2.2 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
  - 1.2.3 Pembahasan APBD
  - 1.2.4 Pembahasan Perubahan APBD
  - 1.2.5 Pembahasan Laporan Semester
  - 1.2.6 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
- 1.3 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
  - 1.3.1 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
  - 1.3.2 Pelaksanaan Reses
- 1.4 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
  - 1.4.1 Pengawasan Kode Etik DPRD
- 1.5 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
  - 1.5.1 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
  - 1.5.2 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
  - 1.5.3 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat

- 1.5.4 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
- 1.5.5 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam
- 1.5.6 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
- 1.5.7 Pengawasan Penggunaan Anggaran
- 1.5.8 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
- 1.6 Peningkatan Kapasitas DPRD
  - 1.6.1 Pendalaman Tugas DPRD
  - 1.6.2 Publikasi dan Dokumentasi Dewan
  - 1.6.3 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
  - 1.6.4 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
  - 1.6.5 Penyusunan Program Kerja DPRD
- 1.7 Fasilitasi Tugas DPRD
  - 1.7.1 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPR
  - 1.7.2 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
  - 1.7.3 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
  - 1.7.4 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

## **2. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

- 2.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - 2.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan PD
  - 2.1.2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - 2.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - 2.3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

- 2.3.2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 2.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - 2.4.1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 2.4.2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - 2.4.3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - 2.4.4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan/Material
  - 2.4.5 Fasilitas Kunjungan Tamu
  - 2.4.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 2.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 2.5.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - 2.5.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 2.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 2.6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - 2.6.2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - 2.6.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 2.7 Layanan Keuangan dan Administrasi DPRD
  - 2.7.1 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
  - 2.7.2 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
  - 2.7.3 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD

## 2.8 Layanan Administrasi DPRD

### 2.8.1 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD

Sedangkan Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024 sebagaimana perubahan RPJMD dan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 tertuang dalam Tabel 3.2.



**Tabel 3.2. T-C.33**

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 Dan Perkiraan Maju Tahun 2024

OPD : Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA</b>	Nilai SAKIP	Setwan	79 (BB)	47.261.067.410	APBD		80 (A)	
	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai target	Setwan	90%	20.000.000	APBD		90%	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Setwan	2 dokumen	10.000.000	APBD		2 dokumen	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Setwan	4 laporan	10.000.000	APBD		4 dokumen	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	Setwan	90%	3.339.369.000	APBD		90%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN per bulan	Setwan	27 orang/ bulan	3.339.369.000	APBD		27 orang/ bulan	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	IP ASN Perangkat Daerah	Setwan	81	600.000.000	APBD		82	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Setwan	30 paket	100.000.000	APBD		30 paket	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Setwan	70 orang	500.000.000	APBD		70 orang	

	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	<b>Setwan</b>	<b>100%</b>	1.001.914.290	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Setwan	9,00	6.914.290	APBD		5 paket	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Setwan	12,00	35.000.000	APBD		12,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Setwan	1,00	150.000.000	APBD		1,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Setwan	1,00	10.000.000	APBD		1,00	
	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Setwan	1,00	150.000.000	APBD		1,00	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Setwan	12,00	200.000.000	APBD		12,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Setwan	12,00	450.000.000	APBD		12,00	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan</b>	<b>Setwan</b>	<b>100%</b>	<b>2.500.000.000</b>	<b>APBD</b>		<b>100 %</b>	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Setwan	12,00	600.000.000	APBD		12,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor yang disediakan	Setwan	48,00	1.900.000.000	APBD		48,00	

	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase barang milih daerah dalam keadaan baik</b>	<b>Setwan</b>	82%	2.350.000.000	<b>APBD</b>		82%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Setwan	24,00	600.000.000	APBD		24,00	
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Setwan	1 unit	1.350.000.000	APBD		1 unit	
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	Setwan	58 unit	400.000.000	APBD		58 unit	
	<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD terfasilitasi	<b>Setwan</b>	100%	36.749.784.120	<b>APBD</b>		100%	
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Setwan	50 org/bln	36.264.784.120	APBD		50 org/bln	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Setwan	150,00	400.000.000	APBD		150,00	
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Setwan	50,00	85.000.000	APBD		50,00	
	<b>Layanan Administrasi DPRD</b>	Persentase Layanan Administrasi DPRD terfasilitasi	Setwan	100%	700.000.000	APBD		100%	
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat DPRD	Setwan	12,00	700.000.000	APBD		12,00	
	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	Persentase Dukungan Pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang terfasilitasi		<b>81%</b>	<b>40.716.900.046</b>			<b>90%</b>	
		Persentase Pelaksanaan tugas dan fungsi		75%	<b>6.870.000.000</b>			80%	

		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang terfasilitasi							
	<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	Persentase Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD terfasilitasi	<b>Setwan</b>	75%	6.870.000.000	<b>APBD</b>		80%	
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Setwan	2,00	550.000.000	APBD		2	
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Setwan	6,00	4.000.000.000	APBD		4	
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan / Keterangan dan / atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Setwan	4,00	2.320.000.000	APBD		4	
		Persentase Pelaksanaan tugas dan fungsi Pembahasan Kebijakan Anggaran yang terfasilitasi		90%	7.856.900.046			90%	
	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	Persentase dokumen Kebijakan Anggaran dibahas	<b>Setwan</b>	90%	7.856.900.046	<b>APBD</b>		90%	
	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Setwan	1,00	1.118.408.000	APBD		1,00	
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Setwan	1,00	1.110.024.000	APBD		1,00	
	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Setwan	1,00	3.050.000.000	APBD		1,00	
	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Setwan	1,00	1.118.024.000	APBD		1,00	
	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Setwan	1,00	342.420.046	APBD		1,00	

	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Setwan	1,00	1.118.024.000	APBD		1,00	
		Persentase Pelaksanaan tugas dan fungsi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang terfasilitasi		80%	8.650.000.000			80%	
	<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan terfasilitasi</b>	<b>Setwan</b>	80%	8.650.000.000	<b>APBD</b>		80%	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan dan Hukum	Setwan	4,00	1.600.000.000	APBD		4,00	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Urusan Bidang Infrastruktur	Setwan	2,00	900.000.000	APBD		2,00	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah laporan hasil pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Setwan	4,00	1.600.000.000	APBD		4,00	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Setwan	4,00	1.600.000.000	APBD		4,00	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Setwan	2,00	900.000.000	APBD		2,00	
	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah dokumen hasil Pengawasantindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK	Setwan	1,00	400.000.000	APBD		1,00	
	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah dokumen hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Setwan	1,00	650.000.000	APBD		1,00	
	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala	Setwan	1,00	1.000.000.000	APBD		1,00	

		Daerah							
		Persentase Pemenuhan Hak dan Kewajiban DPRD sesuai Peraturan		90%	17.340.000.000			90%	
	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD terfasilitasi	Setwan	90%	4.720.000.000	APBD		90%	
	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Setwan	6,00	3.200.000.000	APBD		6,00	
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Setwan	12,00	700.000.000	APBD		12,00	
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Setwan	10,00	120.000.000	APBD		10,00	
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Setwan	70,00	150.000.000	APBD		70,00	
	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Setwan	1,00	550.000.000	APBD		1,00	
	<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	Persentase kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat terfasilitasi	<b>Setwan</b>	100%	2.820.000.000	<b>APBD</b>		100%	
	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Setwan	1,00	120.000.000	APBD		1,00	
	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Setwan	3,00	2.700.000.000	APBD		3,00	
	<b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>	Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD terfasilitasi	<b>Setwan</b>	90%	300.000.000	<b>APBD</b>		90%	
	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Setwan	3,00	300.000.000	APBD		3,00	
	<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>	<b>Persentase Tugas DPRD</b>	<b>Setwan</b>	90%	9.500.000.000	<b>APBD</b>		90%	

		<b>terfasilitasi</b>							
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Setwan	4,00	5.000.000.000	APBD		4,00	
	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Setwan	1,00	850.000.000	APBD		1,00	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Setwan	3,00	650.000.000	APBD		3,00	
	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Setwan	4,00	3.000.000.000	APBD		4,00	

\*\*Cara menghitung capaian kinerja pada level kegiatan dilakukan dengan cara menjumlah persentase capaian tiap sub kegiatan dibagi dengan jumlah sub kegiatan pada kegiatan tersebut.

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2023 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya caapaian visi, misidan tujuan RPJMD Kabupaten Mojokerto 2021-2026 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kab. Mojokerto yaitu : **“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Maju, Adil dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur dan peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia”**, ditempuh melalui lima misi dimana Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto melaksanakan misike 3 (tiga) yaitu **“Mewujudkan Pelayanan Publik yang Optimal”** dengan tujuan RPJMD. Guna mewujudkan visi dan misi, beserta tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, maka diperlukan rumusan Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Kabupaten Mojokerto tahun 2021 - 2026 yang akan dilaksanakan melalui program – program Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto.

Program Kegiatan yang mendukung Program Prioritas Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 merupakan deskripsi hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang kabupaten kota yang dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.



Berdasarkan hal tersebut, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto tidak mempunyai penelaahan usulan program dan kegiatan yang mendukung Program Tahun 2023 dimaksud dikarenakan tidak adanya keterkaitan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Sekretariat DPRD adalah OPD penunjang yang merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sedangkan uraian kegiatan Prioritas Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto dapat dijabarkan pada Tabel Program Prioritas Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagai berikut:

**TABEL 4.1**  
**REKAPITULASI DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2023**  
**SESUAI RANCANGAN RENJA 2023**

No	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMDA / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	UP	B/L	INDIKATOR KINERJA				LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		APBN		
					OUTPUT SUB KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	OUTPUT PROGRAM	TARGET			SKPD Terkait	PAGU (Rp)	K/L	R/p	D/TB/DAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA					Nilai SAKIP	<b>79 (BB)</b>	SET WAN	<b>47.261.067.410</b>					
							Jumlah Inovasi yang terinternalisasi serta berkelanjutan	<b>1 inovasi</b>							
		<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai target		<b>90%</b>	SET WAN	20.000.000					
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah			2 dokumen	SET WAN	10.000.000					
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah			7 laporan	SET WAN	10.000.000					
		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>Presentase</b>		<b>83%</b>	SET WAN	3.339.369.000					



		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1 paket	SET WAN	150.000.000				
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			1 dokumen	SET WAN	10.000.000				
		Penyediaan Bahan / Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			1 paket		150.000.000				
		Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			12 laporan	SET WAN	200.000.000				
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 laporan	SET WAN	450.000.000				
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>Presentase penyedia an jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan</b>		100%	SET WAN	2.500.000.000				
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan			12,00	SET WAN	600.000.000				

				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan										
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor yang disediakan			48,00	SET WAN	1.900.000.000					
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>Presentase barang milik daerah dalam kondisi baik</b>		82%	SET WAN	2.350.000.000					
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak perijinan Kendaraan dinas operasional dan lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			24,00	SET WAN	600.000.000					
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi			1 unit	SET WAN	1.350.000.000					
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau			58 unit	SET WAN	400.000.000					

				Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitas										
		<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>			<b>Persentase layanan</b>		100%	SET WAN	36.749.784.120					
		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD		Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD			700 org	SET WAN	36.264.784.120					
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan			150,00	SET WAN	400.000.000					
		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD			50,00	SET WAN	85.000.000					
		<b>Layanan Administrasi DPRD</b>			Persentase layanan Administrasi DPRD		100%	SET WAN	700.000.000					
		Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		Jumlah laporan hasil Fasilitasi koordinasi dan Konsultasi DPRD			12,00	SET WAN	700.000.000					
		<b>Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD</b>						SET WAN	<b>40.716.900.046</b>					
						Persentase Pelaksanaan tugas dan fungsi Pembentukan Peraturan Daerah	75%	SET WAN	<b>6.870.000.000</b>					

						dan Peraturan DPRD yang terfasilitasi								
		<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>				<b>Persentase Pembentukan Peraturan Daerah dan peraturan daerah dan peraturan DPRD Terfasilitasi</b>		75%		6.870.000.000				
		Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah			Persentase Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD terfasilitasi			2,00		550.000.000				
		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah			6,00		4.000.000.000				
		Fasilitasi Penyusunan Penjelasan / Keterangan dan / atau Naskah Akademik			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah			4,00		2.320.000.000				
						Persentase		90%		7.856.900.046				

						Pelaksanaan tugas dan fungsi Pembahasan Kebijakan Anggaran yang terfasilitasi								
		<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>				Persentase dokumen kebijakan Anggaran dibahas	90%	SET WAN	7.856.900.046					
		Pembahasan KUA dan PPAS			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS		1,00	SET WAN	1.118.408.000					
		Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		1,00	SET WAN	1.110.024.000					
		Pembahasan APBD			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD		1,00	SET WAN	3.050.000.000					
		Pembahasan APBD Perubahan			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan		1,00	SET WAN	1.118.024.000					
		Pembahasan Laporan Semester			Jumlah Dokumen Hasil		1,00	SET WAN	342.420.046					



				Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester										
		Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD			1,00	SET WAN	1.118.024.000					
						Persentase Pelaksanaan tugas dan fungsi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang terfasilitasi	80%	SET WAN	8.650.000.000					
		<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>				Persentase pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan terfasilitasi	80%	SET WAN	8.650.000.000					
		Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum			4,00	SET WAN	1.600.000.000					
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		Jumlah Laporan Hasi Pengawasan			2,00	SET WAN	900.000.000					

				Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur										
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat			4,00	SET WAN	1.600.000.000					
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian			4,00	SET WAN	1.600.000.000					
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam			2,00	SET WAN	900.000.000					
		Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan			1,00	SET WAN	400.000.000					
		Pengawasan Penggunaan Anggaran		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran			1,00	SET WAN	650.000.000					
		Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah			1,00	SET WAN	1.000.000.000					

				Daerah									
					Persentase Pemenuhan Hak dan Kewajiban DPRD sesuai Peraturan	90%	SET WAN	17.340.000.000					
		<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>			Persentase peningkatan Kapasitas DPRD terfasilitasi	90%	SET WAN	4.720.000.000					
		Pendalaman Tugas DPRD			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6,00	SET WAN	3.200.000.000					
		Publikasi dan Dokumentasi Dewan			Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	12,00	SET WAN	700.000.000					
		Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	10,00	SET WAN	120.000.000					
		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	70,00	SET WAN	150.000.000					
		Penyusunan Program Kerja DPRD			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1,00	SET WAN	550.000.000					
		<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>			Persentase kegiatan penyerapan dan penghimpunan aspirasi	100%	SET WAN	2.820.000.000					

					masyarakat terfasilitasi									
		Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD			<b>Jumlah Dokumen Pokok Pikiran DPRD yang tersusun</b>		1,00	SET WAN	120.000.000					
		Pelaksanaan Reses			Jumlah dokumen hasil pelaksanaan reses		3,00	SET WAN	2.700.000.000					
		<b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>				Persentase pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD terfasilitasi	90%	SET WAN	300.000.000					
		Pengawasan Kode Etik DPRD			Jumlah laporan hasil pengawasan kode etik DPRD		3,00	SET WAN	300.000.000					
		<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>				Persentase tugas DPRD terfasilitasi	90%	SET WAN	9.500.000.000					
		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		4,00	SET WAN	5.000.000.000					
		Penyusunan Laporan Kinerja DPRD			Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkap		1,00	SET WAN	850.000.000					

				an dan Kinerja DPRD yang Disusun										
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah			3,00	SET WAN	650.000.000					
		Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD			4,00	SET WAN	3.000.000.000					

## **BAB V PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Tahun 2023 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026.

Renja sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan melalui perencanaan kegiatan yang berkualitas. Renja ini diharapkan mampu menjadi acuan dan pedoman Penyelenggaraan Program dan Kegiatan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sekretariat DPRD Kab. Mojokerto pada tahun 2023 dan sebagai pengukur rencana capaian kinerja organisasi.

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam Renja Sekretariat DPRD Tahun 2023 bertujuan untuk meningkatkan dan mencapai perencanaan kegiatan berkualitas. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran kinerja yang tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto tahun 2021-2026 tersebut, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Renja Sekretariat DPRD tahun 2023, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar Bagian mengingat pewaktuan serta pencapaian indikator kinerja.
2. Renja Sekretariat DPRD tahun 2023, menjadi dasar bagi penyusunan RKA/DPPA Sekretariat DPRD serta pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya.

Rencana Kerja tahun 2023 merupakan refleksi dari asumsi ketercapaian indikator kinerja dengan memperhatikan evaluasi tahun anggaran 2021, guna mengantisipasi hal-hal yang perlu dilaksanakan dalam mewujudkan konsistensi perencanaan dan penganggaran. Dengan demikian berdasar hasil evaluasi pelaksanaan renja pada tahun 2023, dapat diketahui asumsi-asumsi pencapaian keberhasilan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana yang telah tertuang dalam Renstra Sekretariat DPRD tahun 2021-2026.

Akhir kata, semoga Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto ini dapat dilaksanakan dengan baik disertai kerja keras dan dedikasi yang tinggi dari segenap aparatur di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi.

Dengan disusunnya Renja Tahun 2023 yang selanjutnya ditetapkan Renja Tahun 2023 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN MOJOKERTO**



**BAMBANG WAHYUADI, MH**  
Pembina Utama Muda  
NIP.196710201989031009